



**PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER**



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET, DAN INOVASI DAERAH**

2025

2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	8
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	16
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	16
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	26
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember	29
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	35
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	35
2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember.....	37
2.2.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	39
2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
2.2.4 Penentuan isu-isu strategis.....	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	46
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB V PENUTUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	26
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	27
Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	28
Tabel 2. 4 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	28
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember	30
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan	34
Tabel 2. 7 Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	35
Tabel 2. 8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	38
Tabel 2. 9 Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	39
Tabel 2. 10 Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	40
Tabel 2. 11 Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah ditinjau dari implikasi RTRW	42
Tabel 2. 12 Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah ditinjau dari implikasi KLHS	43
Tabel 2. 13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	44
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ...	46
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	7
Gambar 3. 1 Cascading Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renstra

2. Penyusunan Rancangan awal Renstra

Penyusunan rancangan awal Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renstra yang telah disempurnakan dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra. Rancangan Renstra yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Lintas Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan Verifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD

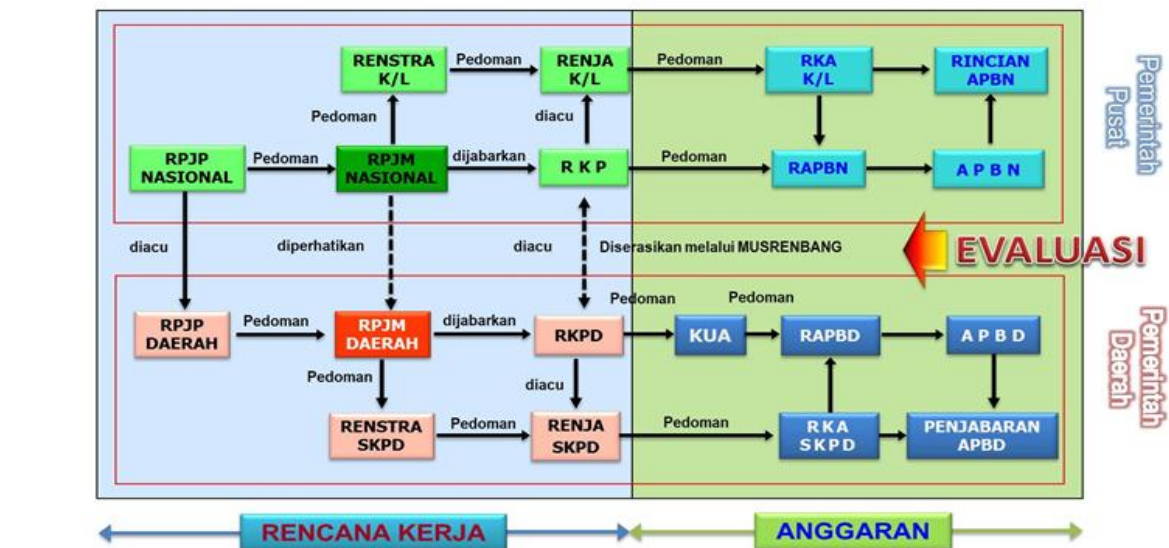
4. Penyusunan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Keterkaitan Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini untuk menjamin:
 - a. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
 - b. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Jember.
2. Memperhatikan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan Perencanaan di Kabupaten Jember dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Penyusunan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 menggunakan pemutakhiran nomenklatur terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi,

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
30. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparat Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparat perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.1.2 Sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.1.3 Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah /termasuk capaian SPM)

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III.TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

3.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

3.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

3.3 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

3.4 Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BAB VI. PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) merupakan salah satu Perangkat Daerah yang unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan bidang inovasi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi secara berkelanjutan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bapperida Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
5. pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Bapperida beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida Kabupaten Jember. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- b. pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;

- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sekretariat;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawain;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Badan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi Badan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Badan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam dan mengkoordinasikan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j. pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR;
- m. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan Pembangunan daerah
- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi

- pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. pelaksanaan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah
 - f. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
 - p. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - q. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - r. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - s. pemantauan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - t. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;

- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Riset dan Inovasi daerah;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Bapperida Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Bapperida Kabupaten Jember.

Berdasarkan data kepegawaian Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember pada Juni 2025 jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 40 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	4
4	Eselon IV/a	2
	Jumlah	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdapat 1 (satu) orang eselon II/b, 1 (satu) orang eselon III/a, dan 4 (empat) orang eselon III/b, dan 2 (dua) orang eselon IV/a

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/c	1	0	1
2	Golongan IV/b	0	0	0
3	Golongan IV/a	4	2	6
4	Golongan III/d	6	3	9
5	Golongan III/c	1	1	2
6	Golongan III/b	2	0	2
7	Golongan III/a	5	7	12
8	Golongan II/d	1	0	1
9	Golongan II/c	0	0	0
10	Golongan II/b	1	0	1
11	Golongan II/a	0	0	0
12	PPPK	5	1	6
13	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	9	2	11
	Jumlah	34	16	51

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari : 1 (satu) Orang Golongan IV/c, 6 (enam) Orang Golongan IV/a, 9 (sembilan) Orang Golongan III/d, 2 (dua) Golongan III/c, 2 (dua) Orang Golongan III/b, 12 (dua belas) Orang Golongan III/a, 1 (satu) Orang Golongan II/d, 1 (satu) Orang Golongan II/b, 6 (enam) Orang PPPK, dan terdiri dari 11 (sebelas) Orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh waktu).

Gambaran ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	5	4	9
2.	Sarjana S-1	17	9	26
3.	Diploma III	2	0	2
4.	SLTA	10	3	13
5	SLTP	1	0	1
6	SD/ sederajat	0	0	0
	Jumlah	35	16	51

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari 9 (sembilan) Orang lulusan Magister S-2, 26 (dua puluh enam) Orang lulusan Sarjana S-1, 2 (dua) orang lulusan Diploma III, 13 (tiga belas) orang lulusan SLTA dan 1 (satu) orang lulusan SLTP.

Untuk menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember difasilitasi sejumlah asset sebagai sarana dan prasarana pendukung tugas fungsi organisasi. Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Bapperida Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 7.379.664.050,00,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	-	-		-	-	
2	Peralatan dan Mesin	560	5.350.252.700,00		-	-	
3	Gedung dan Bangunan	-	-		-	-	
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-		-	-	
5	Aset Tetap lainnya	5	2.376.000,00		-	-	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-		-	-	
7	Aset Lainnya	205	2.027.035.350,00		-	-	
JUMLAH		770	7.379.664.050,00				

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember

Kinerja Bapperida meliputi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi secara berkelanjutan. Pada periode Renstra 2021-2026 Urusan Perencanaan dan Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah, dengan harapan hasilnya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bapperida Kabupaten Jember telah menetapkan kebijakan untuk memperkuat dan memantapkan proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan. Adapun capaian kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Jember dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)			
					(2022)	(2023)	(2024)		(2022)	(2023)	(2024)		(2022)	(2023)	(2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)		(16)	(17)	(18)	
	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja				21,93	22,45	23		22,2	21,87	21,94		101,23%	97,42%	95,39%	
	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja				14,92	14,97	18		17,44	17,25	17,36		116,89%	115,23%	96,44%	
	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai				75%	75%	80%		75%	75%	100%		100,00%	100,00%	125,00%	
	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD				89%	90%	91%		90%	90%	91%		101,12%	100,00%	100,00%	
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD				89%	90%	91%		90%	90%	91%		101,12%	100,00%	100,00%	

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
	Indeks Inovasi Daerah				58,72	59,12	59,62			58,72	57,97	71,09			100,00%	98,05%	119,24%		
	Nilai SAKIP OPD				BB	BB	BB												
	Persentase Indikator Program yang tercapai				100 %	100 %	100 %								0,00%	0,00%	0,00%		

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

Dari sajian tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja perencanaan dan pengukuran kinerja dalam lingkup perangkat daerah selama periode tahun 2022-2024 menunjukkan capaian yang cukup baik. Beberapa indikator bahkan mencatatkan realisasi capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Misalnya, pada indikator Penilaian/Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja, meskipun capaian cenderung menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 indikator ini mencapai rasio 101,23% terhadap target. Penurunan capaian di tahun 2023 dan 2024 hingga menjadi 95,39% dipengaruhi oleh dinamika implementasi kebijakan perencanaan serta peningkatan standar evaluasi.

Indikator Penilaian/Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja juga menunjukkan performa yang sangat baik, terutama pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian di atas 115%. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan capaian menjadi 96,44%, yang masih tergolong tinggi meskipun berada di bawah target.

Sementara itu, indikator Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai menunjukkan capaian maksimal bahkan melebihi target pada tahun 2024 dengan persentase 125%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah telah berjalan efektif dan efisien. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi lintas sektor serta penguatan pengendalian dan evaluasi program secara berkala.

Untuk indikator keselarasan dokumen perencanaan, seperti Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD dan Renja PD dengan RKPD, capaian pada ketiga tahun selalu mencapai atau melebihi target. Hal ini mencerminkan konsistensi perencanaan di tingkat daerah serta efektivitas koordinasi antar perangkat daerah.

Pada indikator Indeks Inovasi Daerah, terlihat peningkatan signifikan terutama pada tahun 2024 yang mencapai 119,24% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa daerah semakin adaptif dan responsif dalam mendorong inovasi, baik dari segi pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat dinilai capaiannya, seperti Nilai SAKIP OPD dan Persentase Indikator Program yang Tercapai, yang tidak memiliki data realisasi pada periode tersebut. Hal ini menjadi catatan penting untuk penyempurnaan pengumpulan dan pelaporan data kinerja ke depan.

Pada indikator Persentase Indikator Program yang Tercapai selama periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang relatif tinggi meskipun belum sepenuhnya

mencapai target 100%. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 93%, kemudian 92% pada tahun 2023, dan 88% pada tahun 2024. Angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar indikator program tetap dapat direalisasikan sesuai perencanaan, dengan tingkat capaian di atas 85%. Hal ini mencerminkan komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan program meskipun menghadapi berbagai dinamika dan tantangan.

Secara umum, capaian indikator-indikator tersebut mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan. Dukungan anggaran yang memadai, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja tersebut.

Kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Jember selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Bapperida Kabupaten Jember, juga dapat diukur melalui kinerja anggaran. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)	(5)	(6)	(2022)	(2023)	(2024)	(10)	(11)	(2022)	(2023)	(2024)	(15)	(16)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.971.880.663	9.372.004.396	8.841.949.954			6.955.078.774	7.973.250.900	7.122.391.680			87,25%	85,08%	80,55%				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.088.520.691	2.550.794.900	3.464.209.200			1.675.772.763	1.989.153.391	2.127.896.063			80,24%	77,98%	61,43%				
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.392.524.049	3.027.000.360	3.438.390.180			2.193.801.931	2.223.425.653	2.527.591.823			64,67%	73,45%	73,51%				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.616.633.653	2.643.624.100	2.142.181.000			1.084.611.200	2.520.910.907	895.376.684			67,09%	95,36%	41,80%				

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Program-program yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Jember merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Bapperida Kabupaten Jember. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan – kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang pada Bapperida Kabupaten Jember. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Bapperida Kabupaten Jember secara langsung adalah Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jember.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 7 Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas Perencanaan Belum Optimal	1. Dokumen perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan	1. Data sektoral yang belum mutakhir

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		kebutuhan dan potensi daerah 2. Penyusunan perencanaan belum berbasis data dan analisis mendalam	
			2. Keterbatasan kompetensi teknis SDM dalam perencanaan berbasis evidence
			3. Perubahan kebijakan nasional yang tidak cepat direspons ke dalam perencanaan daerah
			4. Kurangnya pelatihan teknis tentang pendekatan pembangunan berkelanjutan dan inovatif
2	Sinkronisasi Program Antar-Perangkat Daerah Lemah	1. Koordinasi lintas sektor yang belum berjalan efektif	1. Belum optimalnya pelaksanaan forum koordinasi berkala yang produktif
			2. Lemahnya pengawasan internal dan harmonisasi lintas bidang
3	Capaian Kinerja Pembangunan Tidak Konsisten	1. indikator kinerja daerah tidak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten 2. tidak tercapainya beberapa target indikator makro	1. Kurang tajamnya indikator kinerja dalam dokumen perencanaan
			2. Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan
			3. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengawasan
4	Keterbatasan Pemanfaatan Riset dan Data dalam Perencanaan	1. hasil riset dan data ilmiah tidak dijadikan dasar utama dalam perumusan kebijakan 2. belum adanya kebijakan daerah yang berbasis penelitian lokal	1. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga litbang/ perguruan tinggi
			2. Kurangnya anggaran khusus untuk penelitian terapan daerah
			3. Belum tersedia platform berbagi hasil riset yang terintegrasi dengan sistem perencanaan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
5	Inovasi Daerah Belum Terinstitusionalisasi	1. belum banyak inovasi yang dikembangkan dan diadopsi dalam pelayanan publik dan kebijakan 2. stagnansi inovasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah	1. Budaya birokrasi yang masih konservatif dan kurang adaptif
			2. Kurangnya sistem penghargaan atau insentif bagi inovator internal
			3. Minimnya kapasitas SDM dalam hal design thinking, inovasi sosial, dan digitalisasi
6	Sistem Evaluasi dan Feedback Kurang Efektif	1. hasil evaluasi pembangunan belum dijadikan dasar perbaikan perencanaan 2. feedback dari stakeholders tidak terakomodasi dengan baik	1. Sistem pelaporan kinerja belum cukup interaktif dan responsif
			2. Kurangnya ruang partisipasi publik dan akademisi dalam mengevaluasi program pembangunan
			3. Evaluasi hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh efektivitas program
7	Lemahnya Kapasitas dan Kompetensi SDM	1. perencana yang belum menguasai metodologi perencanaan modern 2. pelatihan dan pengembangan kapasitas tidak merata	1. Tidak ada kurikulum pelatihan berkelanjutan untuk perencana
			2. Terbatasnya akses SDM terhadap pelatihan online atau platform digital
			3. Kurangnya dukungan anggaran untuk pengembangan kapasitas internal

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

- Misi 1** : Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2** : Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara
- Misi 3** : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4** : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5** : Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Bapperida Kabupaten Jember adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik

Tabel 2. 8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke 3: Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik	a. Komitmen pimpinan terhadap perencanaan berbasis data b. Ketersediaan platform digital seperti SIPD dan SIPPD c. Adanya forum Musrenbang dan koordinasi lintas perangkat daerah d. Ketersediaan indikator makro pembangunan dan sistem monitoring e. Kesadaran untuk meningkatkan outcome pembangunan daerah f. Arah kebijakan nasional dan daerah	a. Data sektoral tidak mutakhir atau tidak tersedia b. Keterbatasan kompetensi teknis SDM dalam perencanaan berbasis evidence. c. Forum koordinasi belum berjalan efektif dan tidak produktif d. Indikator kinerja dalam dokumen perencanaan belum tajam dan terukur. e. Sistem monev belum fokus pada hasil (outcome), masih administratif f. Tidak adanya sinergi dengan lembaga riset/perguruan tinggi

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		mendorong penguatan riset terapan g. Dukungan visi dan misi daerah terhadap birokrasi inovatif dan adaptif h. Tersedianya ruang pengembangan inovasi internal OPD i. Tersedianya sistem akuntabilitas kinerja seperti LAKIP dan SAKIP j. Adanya keterlibatan stakeholders dalam perencanaan. k. Dukungan misi daerah terhadap profesionalisme, teknologi, dan pelayanan publik l. Semangat ASN yang terbuka terhadap inovasi dan digitalisasi	g. Budaya birokrasi masih konservatif dan resistensi terhadap perubahan h. Belum ada sistem penghargaan dan insentif bagi pelaku inovasi i. Evaluasi belum menyentuh efektivitas program dan belum partisipatif j. Feedback dari masyarakat dan akademisi belum dimanfaatkan secara optimal k. Tidak ada kurikulum pelatihan berkelanjutan dan pelatihan belum merata l. Keterbatasan anggaran dan akses untuk pengembangan kapasitas SDM

2.2.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra K/L

Tabel 2. 9 Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
K/L belum mempublikasikan Renstra	-	-	-

b. Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2. 10 Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Capaian Program Pembangunan	Perencanaan program pembangunan belum sepenuhnya berbasis data yang akurat dan terkini	Tersedianya aplikasi pendukung perencanaan (SIPD, SIPPD) yang dapat digunakan untuk menyusun rencana berbasis data	Data sektoral dari OPD belum terintegrasi dan belum diperbarui secara berkala
	Sinkronisasi program antara kabupaten dan provinsi belum optimal	Terselenggaranya forum koordinasi seperti Musrenbang dan Rakor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan	Kurangnya mekanisme pengendalian dan monitoring terhadap keselarasan antara program kabupaten dan provinsi
	Evaluasi capaian pembangunan belum digunakan secara maksimal untuk perbaikan perencanaan	Tersedianya dokumen evaluasi seperti LKPJ, LKJIP, dan laporan monev tahunan	Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas teknis dalam analisis evaluasi berbasis indikator kinerja
Berdayagunanya Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan	Hasil riset belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan daerah	BAPPERIDA memiliki kewenangan dan fungsi riset serta inovasi daerah	Belum ada regulasi teknis yang mewajibkan integrasi hasil riset dalam proses penyusunan kebijakan
	Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi masih terbatas	Terdapat sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset di wilayah Jember yang potensial untuk diajak kerja sama	Belum terbangunnya skema kemitraan riset yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan lembaga riset
	Inovasi daerah belum	Adanya dukungan kebijakan dari	Keterbatasan anggaran untuk

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	berkembang secara sistematis dan berkelanjutan	pusat dan provinsi terkait penguatan inovasi daerah	kegiatan riset dan inovasi di tingkat daerah

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Bapperida Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 11 Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Keselaran perencanaan pembangunan dengan dengan arah pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW	RTRW menyediakan arah spasial yang jelas bagi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra PD	terdapat perbedaan antara kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan ruang
2.	RTRW menjadi dasar dalam pengembangan program riset terapan berbasis potensi wilayah	Dukungan kebijakan untuk mengembangkan kawasan strategis dan inovasi berbasis ruang	Masih terbatasnya data spasial terintegrasi untuk mendukung riset berbasis wilayah
3	Usulan program/kegiatan Perangkat Daerah maupun investasi swasta sesuai dengan arahan zonasi RTRW	RTRW berfungsi sebagai acuan untuk mengendalikan kesesuaian program pembangunan dan investasi dengan tata ruang	perbedaan prioritas antar Perangkat Daerah yang mengakibatkan ketidaksinkronan dalam pemanfaatan ruang

Telaah RTRW Kabupaten Jember terhadap tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Jember menunjukkan bahwa dokumen tata ruang ini telah menjadi faktor pendorong utama dalam memastikan arah perencanaan, penelitian, dan pengendalian pembangunan daerah lebih terarah dan berbasis potensi wilayah. Kejelasan struktur dan pola ruang mendorong konsistensi dokumen perencanaan, pengembangan inovasi berbasis potensi lokal, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, dinamika pemanfaatan ruang yang sering tidak sejalan dengan RTRW, keterbatasan data spasial, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal masih menjadi faktor penghambat yang perlu diantisipasi. Secara keseluruhan, RTRW berperan penting sebagai instrumen integrasi pembangunan, meskipun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan Bapperida dalam mengawal implementasi, melakukan pemutakhiran data, dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan

b. Telaahan Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 12 Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Dasar kebijakan, rencana, dan program yang disusun tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	tuntutan agar pembangunan daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendorong KLHS menjadi instrumen utama dalam perencanaan	Perbedaan prioritas antar Perangkat Daerah dapat menghambat sinkronisasi hasil KLHS dalam perencanaan
2	Tersedianya basis data dan analisis lingkungan yang dapat dijadikan pijakan riset tematik, misalnya riset mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan inovasi pembangunan hijau.	KLHS menyediakan basis data lingkungan yang dapat memperkuat perumusan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>)	Masih ada kesenjangan data spasial maupun tematik untuk mendukung analisis KLHS secara komprehensif

2.2.4 Penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat

strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi permasalahan dan isu strategis Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi SDM Perencanaan dan Jaringan Akademik	Kualitas perencanaan belum optimal karena kompetensi SDM dan minimnya pemanfaatan riset	Keterbatasan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam dokumen perencanaan	Kebutuhan perencanaan pembangunan yang mendukung tujuan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Tuntutan implementasi Evidence-Based Policy (EBP) oleh Bappenas di seluruh daerah	Dorongan kolaborasi riset dan inovasi antar kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda	Peningkatan kapasitas perencanaan melalui pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan riset lokal sebagai dasar perencanaan
Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana digitalisasi perencanaan	Dokumen perencanaan belum berbasis data terkini dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil	Kurangnya data spasial dan sosial-ekologis yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan	Transformasi digital dan open government sebagai tuntutan global	Perintah percepatan digitalisasi sistem pemerintahan dan data terbuka dari Presiden RI	Ketimpangan data antar perangkat daerah di Jawa Timur dalam pengambilan kebijakan	Penguatan sistem data perencanaan berbasis digital dan integrasi dengan kebijakan berbasis spasial
Potensi sinergi riset terapan	Hasil riset dan inovasi belum	Rendahnya integrasi hasil riset	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Penguatan ekosistem riset dan	Rendahnya anggaran riset daerah dan	Institusionalisasi pemanfaatan hasil riset

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
dan inovasi bersama perguruan tinggi dan swasta	dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan publik	lingkungan dalam RPJMD dan Renstra OPD	melalui inovasi teknologi ramah lingkungan	inovasi dalam RPJMN 2025-2029	kolaborasi dengan kampus di wilayah se-Karesidenan Besuki	dan inovasi lokal dalam siklus perencanaan dan penganggaran
Keterbukaan Partisipasi Publik sebagai sarana menjangkau masukan kebijakan	Evaluasi dan feedback dari stakeholder belum digunakan secara optimal dalam perencanaan	Kurangnya akomodasi kepentingan masyarakat terdampak dalam analisis kebijakan	Tuntutan partisipasi inklusif dalam perencanaan berbasis hak masyarakat dan lingkungan	Kebijakan nasional mendorong penyusunan dokumen perencanaan yang inklusif dan responsif gender	Kurangnya kesetaraan akses informasi publik antardaerah di Jawa Timur	Penguatan mekanisme evaluasi partisipatif berbasis komunitas dan akademisi untuk memperbaiki kualitas perencanaan
Dukungan regulatif dan semangat inovasi yang sudah mulai tumbuh	Inovasi belum menjadi budaya kerja dan belum sistematis diadopsi dalam birokrasi	Kurangnya kebijakan inovatif dalam menghadapi risiko lingkungan dan sosial jangka panjang	Desakan reformasi birokrasi adaptif dan inovatif untuk merespons ketidakpastian global	Kebijakan Smart ASN dan Sistem Merit menuntut peningkatan kompetensi inovatif ASN	Kompetisi inovasi antar daerah di Jawa Timur belum merata dampaknya terhadap kualitas layanan	Institusionalisasi inovasi daerah melalui regulasi, insentif, dan pengembangan kapasitas ASN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju”** dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah termasuk dalam Misi ke-3 yakni Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	71,09	71,5	72	72,5	73	73,5
			Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten) (Angka)	21,94	24,61	24,92	25,27	26,33	28,43
			Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	17,36	19,47	19,72	20,00	20,83	22,50
	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (Persentase)	80	90	90	90	90	90
			Persentase PD dengan capaian program melebihi target (%)	73,33	75	77	79	80	80,5
	Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah		Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)	65	67	68	69	70	71
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan (%)	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi pengelolaan sumber daya perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bapperida) (Nilai)	80,71	81	82	83	84	85

Gambar 3. 1 Cascading Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember

TUJUAN	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah					
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)					
	Nilai SAKIP Area Perencanaan Kabupaten (Angka)					
	Nilai SAKIP Area Pengukuran Kabupaten (Angka)					
SASARAN	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah		Meningkatnya kematangan inovasi pembangunan daerah		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	
INDIKATOR SASARAN	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya		Persentase PD dengan capaian program melebihi target		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan	
	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
PROGRAM	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah
INDIKATOR PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renja PD		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasandalam Implementasi Pembangunan	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termamfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	
					Persentase Penelitian dan Kajian yang dimanfaatkan	
INDIKATOR PROGRAM						
BIDANG	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bidang Perekonomian dan SDA	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
BIDANG					Sekretariat	

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju
Misi	: Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	1. Sasaran 1.1 Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	1. Strategi 1.1 Peningkatan Kualitas Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Penguatan Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Arah Kebijakan 1.1 Penguatan Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
			1. Arah Kebijakan 1.2 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
	2. Sasaran 2.1 Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	2. Strategi 2.1 Menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi sesuai kebutuhan di daerah	1. Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi
			2. Arah Kebijakan 2.2 Menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek

			3. Arah Kebijakan 2.3 Melakukan bimbingan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi
			4. Arah Kebijakan 2.4 Fasilitasi dan pembinaan untuk memberikan apresiasi prestasi inovasi
			5. Arah Kebijakan 2.5 Melakukan pendataan basis data riset dan inovasi
			6. Arah Kebijakan 2.6 Mempublikasikan hasil pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi pada jurnal ilmiah
			7. Arah Kebijakan 2.7 Melakukan diseminasi dan difusi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi
			8. Arah Kebijakan 2.8 Memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif. - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah				Indeks Inovasi Daerah (Indeks)		
					Nilai SAKIP Area Perencanaan (Angka)		
					Nilai Sakip Area Pengukuran (Angka)		
		Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)		
					Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target (%)		
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

				Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

				Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terselenggaranya koordinasi lintas perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

[illegible]

				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Terselenggaranya koordinasi lintas perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

					Terselenggaranya koordinasi lintas perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
	Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah		Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)		

Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah yang berkualitas.		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Tersedianya hasil kajian dan data kelitbangan bidang pemerintahan dan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan rekomendasi kebijakan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	

				Tersedianya dokumen hasil kajian sosial dan kependudukan yang dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan berbasis evidence	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
				Tersedianya dokumen hasil kajian Ekonomi dan Pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan berbasis evidence	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	

					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
				Terciptanya inovasi daerah yang dapat di implementasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	

			Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya Invensi dan Inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	

			Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi pengelolaan sumber daya perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Realisasi Anggaran (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Terlaksananya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang akuntabel dan terintegrasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Tersedianya dokumen pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Terlaksananya pengelolaan SDM ASN secara tertib dan profesional	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Terpenuhinya dukungan administratif operasional kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Terealisasinya pengadaan barang secara efisien dan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya jasa pendukung operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terjaganya kondisi barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

5.01 - PERENCANAAN				14.496.907.687,05		15.308.621.449,32		15.387.987.713,03		15.420.991.215,32		15.406.593.081,94		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.628.136.487,05		10.674.017.249,32		11.091.175.425,03		11.055.854.784,84		11.021.456.651,46		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	80	82	10.628.136.487,05	83	10.674.017.249,32	84	11.091.175.425,03	85	11.055.854.784,84	86	11.021.456.651,46	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	57,56	61		62		63		64		65			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	84,4	88		89		90		91		92			
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				86.891.100,00		86.891.100,00		90.366.744,00		91.496.324,68		91.496.327,55		
Terlaksananya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang akuntabel dan terintegrasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	86.891.100,00	1	86.891.100,00	1	90.366.744,00	1	91.496.324,68	1	91.496.327,55		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		1		1		1		1			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				61.598.000,00		61.598.000,00		64.061.920,00		64.862.694,00		64.862.694,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	61.598.000,00	2	61.598.000,00	2	64.061.920,00	2	64.862.694,00	2	64.862.694,00		

5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.404.800,00		15.404.800,00		16.020.992,00		16.221.252,00		16.221.254,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	15.404.800,00	1	15.404.800,00	1	16.020.992,00	1	16.221.252,00	1	16.221.254,00		
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.890.300,00		2.890.300,00		3.005.912,00		3.043.484,68		3.043.485,55		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	2.890.300,00	1	2.890.300,00	1	3.005.912,00	1	3.043.484,68	1	3.043.485,55		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.998.000,00		6.998.000,00		7.277.920,00		7.368.894,00		7.368.894,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	6.998.000,00	1	6.998.000,00	1	7.277.920,00	1	7.368.894,00	1	7.368.894,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.837.110.927,05		6.881.455.689,32		7.148.508.843,03		7.101.624.870,16		7.110.466.735,77		
Tersedianya dokumen pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	291	50	6.837.110.927,05	291	6.881.455.689,32	291	7.148.508.843,03	291	7.101.624.870,16	291	7.110.466.735,77		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	55	12		55		55		55		55			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.525.710.927,05		6.570.055.689,32		6.824.652.843,03		6.773.720.670,16		6.782.562.535,77		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	291	50	6.525.710.927,05	291	6.570.055.689,32	291	6.824.652.843,03	291	6.773.720.670,16	291	6.782.562.535,77		
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan				311.400.000,00		311.400.000,00		323.856.000,00		327.904.200,00		327.904.200,00		

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	55	12	311.400.000,00	55	311.400.000,00	55	323.856.000,00	55	327.904.200,00	55	327.904.200,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				361.472.000,00		361.472.000,00		375.930.880,00		380.630.016,00		380.630.016,00		
Terlaksananya pengelolaan SDM ASN secara tertib dan profesional	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	185	160	361.472.000,00	160	361.472.000,00	160	375.930.880,00	160	380.630.016,00	160	380.630.016,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	0		0		4		4		4			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		136.687.500,00		136.687.500,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00	2	136.687.500,00	2	136.687.500,00		
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		10.400.000,00		10.530.000,00		10.530.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	0	0,00	0	0,00	4	10.400.000,00	4	10.530.000,00	4	10.530.000,00		
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				226.472.000,00		226.472.000,00		230.530.880,00		233.412.516,00		233.412.516,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	185	160	226.472.000,00	160	226.472.000,00	160	230.530.880,00	160	233.412.516,00	160	233.412.516,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				421.443.700,00		421.443.700,00		438.304.008,00		406.062.812,00		443.782.808,00		

Terpenuhinya dukungan administratif operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	421.443.700,00	12	421.443.700,00	12	438.304.008,00	12	406.062.812,00	12	443.782.808,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1		200		200		200		200			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	0		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12		1		1		1		1			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.136.500,00		11.136.500,00		11.584.520,00		11.729.326,00		11.729.326,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12	11.136.500,00	1	11.136.500,00	1	11.584.520,00	1	11.729.326,00	1	11.729.326,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				111.717.200,00		111.717.200,00		116.185.888,00		117.638.212,00		117.638.212,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	111.717.200,00	12	111.717.200,00	12	116.185.888,00	12	117.638.212,00	12	117.638.212,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.116.000,00		6.116.000,00		6.360.640,00		6.440.148,00		6.440.148,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	6.116.000,00	12	6.116.000,00	12	6.360.640,00	12	6.440.148,00	12	6.440.148,00		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.500.000,00		4.500.000,00		4.680.000,00		4.738.500,00		4.738.500,00		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	24	4.500.000,00	24	4.500.000,00	24	4.680.000,00	24	4.738.500,00	24	4.738.500,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				272.924.000,00		272.924.000,00		283.840.960,00		249.668.976,00		287.388.972,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1	272.924.000,00	200	272.924.000,00	200	283.840.960,00	200	249.668.976,00	200	287.388.972,00		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.050.000,00		15.050.000,00		15.652.000,00		15.847.650,00		15.847.650,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	0	15.050.000,00	4	15.050.000,00	4	15.652.000,00	4	15.847.650,00	4	15.847.650,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				192.353.200,00		232.353.200,00		240.047.328,00		202.547.920,00		202.547.920,00		
Terealisasinya pengadaan barang secara efisien dan sesuai kebutuhan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	192.353.200,00	1	232.353.200,00	1	240.047.328,00	0	202.547.920,00	0	202.547.920,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		0					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	4		15		15		15		15			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20		20		20		20		20			
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				31.346.900,00		31.346.900,00		32.600.776,00		33.008.286,00		33.008.286,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20	31.346.900,00	20	31.346.900,00	20	32.600.776,00	20	33.008.286,00	20	33.008.286,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				161.006.300,00		161.006.300,00		167.446.552,00		169.539.634,00		169.539.634,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	4	161.006.300,00	15	161.006.300,00	15	167.446.552,00	15	169.539.634,00	15	169.539.634,00		
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		0,00		0,00		

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	0	0,00		0,00		
5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.114.976.879,00		2.096.512.879,00		2.180.373.394,00		2.248.128.061,00		2.167.168.063,14		
Terpenuhinya jasa pendukung operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.114.976.879,00	12	2.096.512.879,00	12	2.180.373.394,00	12	2.248.128.061,00	12	2.167.168.063,14		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		1		1		1		1			
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				196.218.929,00		177.754.929,00		184.865.126,00		166.675.940,00		166.675.940,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	196.218.929,00	12	177.754.929,00	12	184.865.126,00	12	166.675.940,00	12	166.675.940,00		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.599.000,00		57.599.000,00		59.902.960,00		60.651.747,00		60.651.747,00		

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	57.599.000,00	1	57.599.000,00	1	59.902.960,00	1	60.651.747,00	1	60.651.747,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.861.158.950,00		1.861.158.950,00		1.935.605.308,00		2.020.800.374,00		1.939.840.376,14		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.861.158.950,00	3	1.861.158.950,00	3	1.935.605.308,00	3	2.020.800.374,00	3	1.939.840.376,14		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				613.888.681,00		593.888.681,00		617.644.228,00		625.364.781,00		625.364.781,00		
Terjaganya kondisi barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	613.888.681,00	1	593.888.681,00	1	617.644.228,00	1	625.364.781,00	1	625.364.781,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	30		20		20		20		20			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	30		27		27		27		27			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				118.080.000,00		118.080.000,00		122.803.200,00		124.338.240,00		124.338.240,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	1	118.080.000,00	1	118.080.000,00	1	122.803.200,00	1	124.338.240,00	1	124.338.240,00		

atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya (Unit)													
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				344.124.000,00		324.124.000,00		337.088.960,00		341.302.572,00		341.302.572,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	30	344.124.000,00	27	324.124.000,00	27	337.088.960,00	27	341.302.572,00	27	341.302.572,00		
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		20.000.000,00		20.800.000,00		21.060.000,00		21.060.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	30	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.800.000,00	20	21.060.000,00	20	21.060.000,00		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.225.800,00		65.225.800,00		67.834.832,00		68.682.767,00		68.682.767,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	65.225.800,00	50	65.225.800,00	50	67.834.832,00	50	68.682.767,00	50	68.682.767,00		
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.458.881,00		66.458.881,00		69.117.236,00		69.981.202,00		69.981.202,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	66.458.881,00	1	66.458.881,00	1	69.117.236,00	1	69.981.202,00	1	69.981.202,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.883.517.600,00		2.317.837.600,00		2.184.148.544,00		2.210.219.411,60		2.215.219.411,60		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	80	80,10	1.883.517.600,00	80,20	2.317.837.600,00	80,50	2.184.148.544,00	80,70	2.210.219.411,60	90	2.215.219.411,60	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	63,33	70		72		75		80		82			

5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.208.171.700, 00		1.442.491.700, 00		1.381.788.808, 00		1.397.258.091, 60		1.402.258.091, 60		
Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD) (Dokumen)	3	3	1.208.171.700, 00	2	1.442.491.700, 00	2	1.381.788.808, 00	3	1.397.258.091, 60	2	1.402.258.091, 60		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	31	31		31		31		31		31			
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1		1		1		2		1			
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				54.980.000,00		54.980.000,00		57.179.200,00		58.322.784,00		58.322.784,00		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	54.980.000,00	1	54.980.000,00	1	57.179.200,00	2	58.322.784,00	1	58.322.784,00		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				47.014.400,00		47.014.400,00		48.894.976,00		49.872.876,00		49.872.876,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	47.014.400,00	1	47.014.400,00	1	48.894.976,00	1	49.872.876,00	1	49.872.876,00		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				331.968.300,00		531.968.300,00		543.247.032,00		544.976.913,00		549.976.913,00		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	331.968.300,00	1	531.968.300,00	1	543.247.032,00	1	544.976.913,00	1	549.976.913,00		
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				44.951.000,00		44.951.000,00		46.749.040,00		47.684.021,00		47.684.021,00		

Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	31	31	44.951.000,00	31	44.951.000,00	31	46.749.040,00	31	47.684.021,00	31	47.684.021,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				729.258.000,00		763.578.000,00		685.718.560,00		696.401.497,60		696.401.497,60		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	3	729.258.000,00	2	763.578.000,00	2	685.718.560,00	3	696.401.497,60	2	696.401.497,60		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				281.493.000,00		281.493.000,00		292.752.720,00		298.607.774,00		298.607.774,00		
Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	281.493.000,00	1	281.493.000,00	1	292.752.720,00	1	298.607.774,00	1	298.607.774,00		
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	80	1		80		80		80		80			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				110.250.000,00		110.250.000,00		114.660.000,00		116.953.200,00		116.953.200,00		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	110.250.000,00	1	110.250.000,00	1	114.660.000,00	1	116.953.200,00	1	116.953.200,00		
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				171.243.000,00		171.243.000,00		178.092.720,00		181.654.574,00		181.654.574,00		

Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	80	1	171.243.000,00	80	171.243.000,00	80	178.092.720,00	80	181.654.574,00	80	181.654.574,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				315.114.900,00		315.114.900,00		327.719.496,00		330.828.276,00		330.828.276,00		
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	3	315.114.900,00	4	315.114.900,00	4	327.719.496,00	4	330.828.276,00	4	330.828.276,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				315.114.900,00		315.114.900,00		327.719.496,00		330.828.276,00		330.828.276,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	3	315.114.900,00	4	315.114.900,00	4	327.719.496,00	4	330.828.276,00	4	330.828.276,00		
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				78.738.000,00		278.738.000,00		181.887.520,00		183.525.270,00		183.525.270,00		
Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	78.738.000,00	1	278.738.000,00	1	181.887.520,00	1	183.525.270,00	1	183.525.270,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	442	392		150		150		150		150			
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				78.738.000,00		78.738.000,00		81.887.520,00		83.525.270,00		83.525.270,00		

Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	78.738.000,00	1	78.738.000,00	1	81.887.520,00	1	83.525.270,00	1	83.525.270,00		
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	442	392	0,00	150	200.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.985.253.600,00		2.316.766.600,00		2.112.663.744,00		2.154.917.018,88		2.169.917.018,88		
Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	75	79	1.985.253.600,00	81	2.316.766.600,00	83	2.112.663.744,00	85	2.154.917.018,88	90	2.169.917.018,88	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	80	84		86		88		89		90			
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Persentase)	70	79		83		86		88		90			
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				688.255.400,00		763.255.400,00		731.785.616,00		746.421.328,32		751.421.328,32		
Terselenggaranya koordinasi lintas perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4	1	688.255.400,00	4	763.255.400,00	4	731.785.616,00	4	746.421.328,32	4	751.421.328,32		

	Bidang Pemerintahan (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	22	22											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	28	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	14	4		4		4		4		4			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				189.660.800,00		199.660.800,00		205.647.232,00		209.760.176,64		209.760.176,64		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	28	4	189.660.800,00	4	199.660.800,00	4	205.647.232,00	4	209.760.176,64	4	209.760.176,64		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				52.164.000,00		52.164.000,00		52.250.560,00		53.295.571,20		53.295.571,20		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	1	52.164.000,00	4	52.164.000,00	4	52.250.560,00	4	53.295.571,20	4	53.295.571,20		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan				29.604.000,00		29.604.000,00		30.788.160,00		31.403.923,20		31.403.923,20		

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	14	4	29.604.000,00	4	29.604.000,00	4	30.788.160,00	4	31.403.923,20	4	31.403.923,20		
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				135.900.800,00		188.400.800,00		141.936.832,00		144.775.568,64		144.775.568,64		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	4	135.900.800,00	4	188.400.800,00	4	141.936.832,00	4	144.775.568,64	4	144.775.568,64		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				165.900.800,00		175.900.800,00		180.936.832,00		184.555.568,64		189.555.568,64		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	22	22	165.900.800,00		175.900.800,00		180.936.832,00		184.555.568,64		189.555.568,64		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				28.404.000,00		28.404.000,00		29.540.160,00		30.130.963,20		30.130.963,20		

Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4	28.404.000,00	4	28.404.000,00	4	29.540.160,00	4	30.130.963,20	4	30.130.963,20		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				29.604.000,00		29.604.000,00		30.788.160,00		31.403.923,20		31.403.923,20		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4	29.604.000,00	4	29.604.000,00	4	30.788.160,00	4	31.403.923,20	4	31.403.923,20		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				57.017.000,00		59.517.000,00		59.897.680,00		61.095.633,60		61.095.633,60		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4	57.017.000,00	4	59.517.000,00	4	59.897.680,00	4	61.095.633,60	4	61.095.633,60		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				640.270.100,00		765.270.100,00		681.880.904,00		695.518.522,08		700.518.522,08		
Terselenggaranya koordinasi lintas perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	7	4	640.270.100,00	7	765.270.100,00	7	681.880.904,00	7	695.518.522,08	7	700.518.522,08		

	Perekonomian (Laporan)													
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	7	5		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	7	5		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5	5		4		4		4		4			
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				10.800.000,00		20.800.000,00		21.632.000,00		22.064.640,00		22.064.640,00		

Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	7	4	10.800.000,00	7	20.800.000,00	7	21.632.000,00	7	22.064.640,00	7	22.064.640,00		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				48.438.600,00		50.938.600,00		52.976.144,00		54.035.666,88		54.035.666,88		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	7	5	48.438.600,00	7	50.938.600,00	7	52.976.144,00	7	54.035.666,88	7	54.035.666,88		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				177.739.900,00		227.739.900,00		179.849.496,00		183.446.485,92		193.446.485,92		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	7	5	177.739.900,00	7	227.739.900,00	7	179.849.496,00	7	183.446.485,92	7	193.446.485,92		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				49.992.000,00		59.992.000,00		62.391.680,00		63.639.513,60		63.639.513,60		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	5	49.992.000,00	5	59.992.000,00	5	62.391.680,00	5	63.639.513,60	5	63.639.513,60		

	Bidang SDA (Laporan)													
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				58.906.800,00		58.906.800,00		61.263.072,00		62.488.333,44		62.488.333,44		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5	58.906.800,00	5	58.906.800,00	5	61.263.072,00	5	62.488.333,44	5	62.488.333,44		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				294.392.800,00		346.892.800,00		303.768.512,00		309.843.882,24		304.843.882,24		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5	5	294.392.800,00	4	346.892.800,00	4	303.768.512,00	4	309.843.882,24	4	304.843.882,24		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				656.728.100,00		788.241.100,00		698.997.224,00		712.977.168,48		717.977.168,48		
Terselenggaranya koordinasi lintas perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	656.728.100,00	4	788.241.100,00	4	698.997.224,00	4	712.977.168,48	4	717.977.168,48		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	4		4		4		4		4			
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				115.534.200,00		125.534.200,00		128.555.568,00		131.126.679,36		136.126.679,36		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	115.534.200,00	4	125.534.200,00	4	128.555.568,00	4	131.126.679,36	4	136.126.679,36		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan				76.446.600,00		76.446.600,00		79.504.464,00		81.094.553,28		81.094.553,28		

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	4	76.446.600,00	4	76.446.600,00	4	79.504.464,00	4	81.094.553,28	4	81.094.553,28		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				99.979.600,00		152.479.600,00		105.578.784,00		107.690.359,68		107.690.359,68		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	99.979.600,00	4	152.479.600,00	4	105.578.784,00	4	107.690.359,68	4	107.690.359,68		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				95.732.500,00		162.245.500,00		107.961.800,00		110.121.036,00		110.121.036,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	95.732.500,00	4	162.245.500,00	4	107.961.800,00	4	110.121.036,00	4	110.121.036,00		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				100.386.600,00		100.386.600,00		104.402.064,00		106.490.105,28		106.490.105,28		

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	100.386.600,00	4	100.386.600,00	4	104.402.064,00	4	106.490.105,28	4	106.490.105,28		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				168.648.600,00		171.148.600,00		172.994.544,00		176.454.434,88		176.454.434,88		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	168.648.600,00	4	171.148.600,00	4	172.994.544,00	4	176.454.434,88	4	176.454.434,88		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.249.999.800,00		1.660.000.000,00		1.655.000.000,00		1.705.820.000,00		1.759.060.000,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2.230.035.800,00		1.010.000.000,00		1.005.000.000,00		1.055.820.000,00		1.109.060.000,00		
Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah yang berkualitas.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	66,65	67	2.230.035.800,00	68	1.010.000.000,00	69	1.005.000.000,00	70	1.055.820.000,00	71	1.109.060.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0 000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				870.143.800,00		160.000.000,00		171.000.000,00		173.420.000,00		173.420.000,00		
Tersedianya hasil kajian dan data kelitbang bidang pemerintahan dan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan rekomendasi kebijakan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	2	2	870.143.800,00	1	160.000.000,00	1	171.000.000,00	1	173.420.000,00	1	173.420.000,00		

	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
5.05.02.2.01.0002 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				0,00		110.000.000,00		121.000.000,00		123.420.000,00		123.420.000,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0	0	0,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	123.420.000,00	1	123.420.000,00		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				870.143.800,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	2	2	870.143.800,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				800.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00		
Tersedianya dokumen hasil kajian sosial dan kependudukan yang dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan berbasis evidence	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)		1	800.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)		0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan		0		1		1		1		1			

	Pencatatan Sipil (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5	6		5		5		5		5			
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				0,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)		1	0,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00		
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)		1	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				0,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)		0	0,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00		
5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				0,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)		0	0,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00		
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				600.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5	6	600.000.000,00	5	110.000.000,00	5	121.000.000,00	5	133.100.000,00	5	146.410.000,00		

5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				559.892.000,00		60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen hasil kajian Ekonomi dan Pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan berbasis evidence	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)			559.892.000,00	1	60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)		1											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		1											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)		1											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)		1											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		1											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		1											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		1											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)		1											
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0,00		60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)			0,00	1	60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		1	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)		1	9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				300.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)		1	300.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		1	9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		1	9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		1	9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)		1	9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)		1	9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terciptanya inovasi daerah yang dapat di implementasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		0	0,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)		0		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		0		3		3		3		3			
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		0	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)		0	0,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
5.05.02.2.04.0005 - Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		0	0,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				19.964.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi	Persentase Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan (%)	80	85	19.964.000,00	87	650.000.000,00	90	650.000.000,00	92	650.000.000,00	95	650.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0 000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)		1	9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)		1	9.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi				9.982.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Inovasi dan Inovasi	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	0	0	9.982.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00		

	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0			1		1		1		1			
	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	0				1		1		1			
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	0		2		2		2		2			
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual				9.982.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas	0	1	9.982.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

	perlindungan KI) (Laporan)													
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	0	0,00		150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		

NO	PROGRAM PRIORI TAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah		
			<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORI TAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya capaian program pembangunan daerah		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NO	PROGRAM PRIORI TAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

NO	PROGRAM PRIORI TAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	

NO	PROGRAM PRIORI TAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
			Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
			Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	

NO	PROGRAM PRIORI TAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
			Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	

NO	PROGRAM PRIORI TAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta inovasi dan inovasi		
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			Inovasi dan Inovasi	

NO	PROGRAM PRIORI TAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	
			Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	

NO	PROGRAM PRIORI TAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
			Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	
			Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
			Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	71,5	72	72,5	73	73,5	74	
2	Nilai SAKIP Area Perencanaan	Angka	24,61	24,92	25,27	26,33	28,43	24,61	
3	Nilai SAKIP Area Pengukuran	Angka	19,47	19,72	20,00	20,83	22,50	19,47	

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	80	80,05	80,1	80,15	80,2	80,25	

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Lainnya

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	%	67	68	69	70	71	72	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	90	90	90	90	90	90	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001